



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

2015

B 1

Pembangunan Berbasis Masyarakat, No. 3/2015, tanggal 3 Juli 2015, No. 53

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara dan Calon Penyelenggara Negara diwajibkan mengumumkan Harta Kekayaan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

I. DATA PRIBADI		Status Laporan		a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA	
		28 Maret 2013	8 Juni 2016		
1. Nama	: Dr. HADIAT, M.A.			Rp.	164.000.000
2. Jabatan	: DIREKTUR - AGAMA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLARAHAGA			Rp.	3.000.000
3. NIK	: 167645			Rp.	11.000.000
4. Tempat & Tanggal Lahir	: GARUT, 1 Oktober 1960			Rp.	150.000.000
5. Alamat Kantor	: J. TAMAN SUROPATI NO. 2, JAKARTA PUSAT				
6. Tanggal Pelaporan	: 28 Maret 2013, 9 Juni 2016				
<b>II. DATA HARTA</b>					
<b>A. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)</b>		Rp.	Rp.		
1. Tanah & Bangunan seluas 102 m <sup>2</sup> & 102 m <sup>2</sup> , di Kabupaten BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1988 sampai dengan 1997		793.487.000	2.328.798.000		
2. Tanah & Bangunan seluas 102 m <sup>2</sup> & 80 m <sup>2</sup> , di Kabupaten BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1999 sampai dengan 2003		138.720.000	138.720.000		
3. Tanah & Bangunan seluas 158 m <sup>2</sup> & 70 m <sup>2</sup> , di Kabupaten BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011		120.614.000	120.614.000		
4. Tanah seluas 1.227 m <sup>2</sup> , di Kota BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan dari tahun 1992 sampai dengan 1998		142.456.000	142.456.000		
5. Tanah & Bangunan seluas 322 m <sup>2</sup> & 80 m <sup>2</sup> , di Kabupaten BEKASI, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan dari tahun 2004 sampai dengan 2008		196.320.000	196.320.000		
6. Tanah seluas 10.000 m <sup>2</sup> , di Kabupaten KARAWANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun 2000 (Penambahan Data Baru)		105.387.000	105.387.000		
7. Tanah seluas 18.290 m <sup>2</sup> , di Kabupaten KARAWANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun 2001 (Penambahan Data Baru)		---	432.000.000		
8. Tanah & Bangunan seluas 200 m <sup>2</sup> & 285 m <sup>2</sup> , di Kabupaten KARAWANG, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1999 (Penambahan Data Baru)		---	592.596.000		
9. Tanah & Bangunan seluas 400 m <sup>2</sup> & 90 m <sup>2</sup> , di Kabupaten KARAWANG, yang berasal dari HASIL SENDIRI DAN HIBAH, perolehan tahun 2008 (Penambahan Data Baru)		---	301.555.000		
<b>B. HARTA BERGERAK</b>					
<b>1. LOGAM MULIA</b>				Rp.	49.450.000
<b>1. LOGAM MULIA</b> , yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1995 sampai dengan 2005				Rp.	10.000.000
<b>2. LOGAM MULIA</b> , yang berasal dari WARISAN, perolehan tahun 2007				Rp.	3.000.000
<b>3. BENDA BERGERAK LAINNYA</b> , yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1995 sampai dengan 2013				Rp.	36.450.000
<b>C. SURAT BERHARGA</b>					
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA</b>				Rp.	12.733.879
<b>1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)</b>				Rp.	12.733.879
<b>E. PIUTANG</b>					
<b>TOTAL HARTA (I)</b>		Rp.	Rp.	Rp.	829.680.879
<b>III. HUTANG</b>					
<b>1. Hutang dalam bentuk PINJAMAN UANG (Penambahan Hutang baru, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)</b>		USD	USD	USD	700
				USD	350
<b>2. Hutang dalam bentuk PINJAMAN BARANG</b>		Rp.	Rp.	Rp.	11.984.000
<b>3. Hutang dalam bentuk KARTU KREDIT (Penambahan Hutang baru, Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya)</b>		Rp.	Rp.	Rp.	275.557.029
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III)</b>		Rp.	Rp.	Rp.	2.097.960.957
		USD	USD	USD	-700

RONI DWI SUSANTO

CAHYA H. HAREFA

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.